



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan perubahan besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan perubahan besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 105);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.9.820.965.000,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Alokasi DBH Pajak Daerah sebesar Rp.7.685.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Alokasi DBH Retribusi Daerah sebesar Rp.2.135.965.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa, yang selanjutnya disebut DBH Merata;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2018 dari masing-masing Desa, yang selanjutnya disebut DBH Proporsional;
- (5) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH_x = DBH \text{ Merata} + DBH \text{ Proporsional}_x$$

Keterangan :

DBH_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa

DBH Merata : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata yang diterima Desa

DBH Proporsional_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

- (6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan jumlah Desa;
- (7) DBH Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{DBH Proporsional}_x = \text{BD}_x \times \text{DBH Proporsional}$$

Keterangan :

DBH Proporsional_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa

DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional

- (8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data bobot Desa dari Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bahwa ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 41

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 41 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODES	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	3+4	5
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	62.627.700,00	17.406.700,00	80.034.400,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulau	57.003.400,00	15.843.500,00	72.846.900,00	
62.01.01.2003	Sabuai	69.384.400,00	19.284.600,00	88.669.000,00	
62.01.01.2004	Kerava	69.053.500,00	19.192.600,00	88.246.100,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	75.207.000,00	20.902.900,00	96.109.900,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	78.710.000,00	21.876.600,00	100.586.600,00	
62.01.01.2007	Kubu	68.648.400,00	19.080.000,00	87.728.400,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	429.517.600,00	119.379.800,00	548.897.400,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	157.916.200,00	43.891.100,00	201.807.300,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	218.234.800,00	60.656.000,00	278.890.800,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	74.530.200,00	20.714.800,00	95.245.000,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	56.968.400,00	15.833.700,00	72.802.100,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	156.310.100,00	43.444.700,00	199.754.800,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	114.389.400,00	31.793.300,00	146.182.700,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	57.270.300,00	15.917.600,00	73.187.900,00	
	SUB TOTAL	1.745.771.400,00	485.217.900,00	2.230.989.300,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT BELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	57.410.700,00	15.956.600,00	73.367.300,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	911.469.200,00	253.333.200,00	1.164.802.400,00	
62.01.02.2010	Rangda	57.430.000,00	15.962.000,00	73.392.000,00	
62.01.02.2011	Kenambui	62.502.300,00	17.371.800,00	79.874.100,00	
62.01.02.2012	Runtu	57.449.200,00	15.967.300,00	73.416.500,00	
62.01.02.2013	Umpang	59.939.000,00	16.659.400,00	76.598.400,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	89.777.300,00	24.952.600,00	114.729.900,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	65.633.300,00	18.242.000,00	83.875.300,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	94.704.900,00	26.322.200,00	121.027.100,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	85.644.000,00	23.803.800,00	109.447.800,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	73.790.800,00	20.509.300,00	94.300.100,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	75.824.700,00	21.074.600,00	96.899.300,00	
62.01.02.2020	Sulung	58.176.300,00	16.169.400,00	74.345.700,00	
	SUB TOTAL	1.749.751.700,00	486.324.200,00	2.236.075.900,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	59.099.600,00	16.426.100,00	75.525.700,00	
62.01.03.2002	Tempayung	66.468.800,00	18.474.200,00	84.943.000,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	67.848.700,00	18.857.800,00	86.706.500,00	
62.01.03.2004	Kinjil	56.925.900,00	15.821.900,00	72.747.800,00	
62.01.03.2005	Dawak	67.709.600,00	18.819.100,00	86.528.700,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	59.017.000,00	16.403.100,00	75.420.100,00	
62.01.03.2009	Lalang	59.297.200,00	16.481.000,00	75.778.200,00	
62.01.03.2010	Rungun	68.837.800,00	19.132.700,00	87.970.500,00	
62.01.03.2011	Kondang	56.925.900,00	15.821.900,00	72.747.800,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	56.958.500,00	15.835.800,00	72.794.300,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	88.664.500,00	24.643.300,00	113.307.800,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	58.199.700,00	16.175.900,00	74.375.600,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	87.655.400,00	24.362.900,00	112.018.300,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	60.860.700,00	16.915.500,00	77.776.200,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	81.152.900,00	22.555.500,00	103.708.400,00	
	SUB TOTAL	995.622.200,00	276.726.700,00	1.272.348.900,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	56.925.900,00	15.821.900,00	72.747.800,00	
62.01.04.2003	Sukarami	56.925.900,00	15.821.900,00	72.747.800,00	
62.01.04.2004	Gandis	56.925.900,00	15.821.900,00	72.747.800,00	
62.01.04.2005	Kerabu	56.925.900,00	15.821.900,00	72.747.800,00	
62.01.04.2006	Sambi	97.464.200,00	27.089.100,00	124.553.300,00	
62.01.04.2007	Penyombean	62.203.500,00	17.288.800,00	79.492.300,00	
62.01.04.2008	Pandau	65.371.900,00	18.169.400,00	83.541.300,00	
62.01.04.2009	Riam	64.462.300,00	17.916.600,00	82.378.900,00	
62.01.04.2010	Panahan	65.633.400,00	18.242.100,00	83.875.500,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	56.925.900,00	15.821.900,00	72.747.800,00	
	SUB TOTAL	639.764.800,00	177.815.500,00	817.580.300,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	104.913.800,00	29.159.600,00	134.073.400,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	195.729.300,00	54.400.900,00	250.130.200,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	110.243.500,00	30.641.000,00	140.884.500,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	78.063.000,00	21.696.700,00	99.759.700,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	155.265.000,00	43.154.200,00	198.419.200,00	
62.01.05.2006	Purbasari	98.427.800,00	27.356.900,00	125.784.700,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	102.459.100,00	28.477.400,00	130.936.500,00	

KETERANGAN	NAMA STRUKTUR / KODE	DBP	DBP	JUMLAH	KETERANGAN
		PAJAK BANGUNAN	KEPERIBDI BANGUNAN		
		2	3	2 + 3	4
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	167.909.300,00	46.668.600,00	214.577.900,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	73.237.200,00	20.355.500,00	93.592.700,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	115.396.700,00	32.073.200,00	147.469.900,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	144.612.700,00	40.193.500,00	184.806.200,00	
SUB TOTAL		1.346.257.400,00	374.177.500,00	1.720.434.900,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	65.570.300,00	18.224.500,00	83.794.800,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	64.307.200,00	17.873.500,00	82.180.700,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	110.096.600,00	30.600.100,00	140.696.700,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	71.465.700,00	19.863.100,00	91.328.800,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	62.306.000,00	17.317.200,00	79.623.200,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	59.881.800,00	16.643.500,00	76.525.300,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	82.852.200,00	23.027.800,00	105.880.000,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	88.111.200,00	24.489.500,00	112.600.700,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	57.633.400,00	16.018.500,00	73.651.900,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	73.106.100,00	20.319.000,00	93.425.100,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	79.005.400,00	21.958.700,00	100.964.100,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	71.961.300,00	20.000.800,00	91.962.100,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	70.007.300,00	19.457.700,00	89.465.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	57.653.100,00	16.024.000,00	73.677.100,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	67.758.400,00	18.832.700,00	86.591.100,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	62.250.400,00	17.301.800,00	79.552.200,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	63.866.100,00	17.750.800,00	81.616.900,00	
SUB TOTAL		1.207.832.500,00	335.703.200,00	1.543.535.700,00	
TOTAL		2.554.089.900,00	709.880.700,00	3.263.970.600,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	167.909.300,00	46.668.600,00	214.577.900,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	73.237.200,00	20.355.500,00	93.592.700,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	115.396.700,00	32.073.200,00	147.469.900,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	144.612.700,00	40.193.500,00	184.806.200,00	
	SUB TOTAL	1.346.257.400,00	374.177.500,00	1.720.434.900,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	65.570.300,00	18.224.500,00	83.794.800,00	
62.01.06.2002	Mulva Jadi	64.307.200,00	17.873.500,00	82.180.700,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	110.096.600,00	30.600.100,00	140.696.700,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	71.465.700,00	19.863.100,00	91.328.800,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	62.306.000,00	17.317.200,00	79.623.200,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	59.881.800,00	16.643.500,00	76.525.300,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	82.852.200,00	23.027.800,00	105.880.000,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	88.111.200,00	24.489.500,00	112.600.700,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	57.633.400,00	16.018.500,00	73.651.900,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	73.106.100,00	20.319.000,00	93.425.100,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	79.005.400,00	21.958.700,00	100.964.100,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	71.961.300,00	20.000.800,00	91.962.100,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	70.007.300,00	19.457.700,00	89.465.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	57.653.100,00	16.024.000,00	73.677.100,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	67.758.400,00	18.832.700,00	86.591.100,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	62.250.400,00	17.301.800,00	79.552.200,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	63.866.100,00	17.750.800,00	81.616.900,00	
	SUB TOTAL	1.207.832.500,00	335.703.200,00	1.543.535.700,00	
	TOTAL	7.685.000.000,00	2.135.965.000,00	9.820.965.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005